

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Zora Lutvyta Sabrina Hijrianti¹; Dwi Winarni²; Amir³; Hadi Pramono⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas^{1,2,3,4}

Email : zoralutvyash@gmail.com¹; dwiwinarni@ump.ac.id²; amirriset@yahoo.com³;
pramono.hadi.75@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Namun, terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya alokasi belanja modal, ketergantungan pada pemerintah pusat, pendapatan daerah yang tidak mencukupi, dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata, yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, PAD, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan di provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan PAD memiliki pengaruh negatif, sedangkan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci : Belanja Modal; PAD; Dana Perimbangan; Pertumbuhan Ekonomi; Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

Regional financial performance is one of the indicator of the success of regional government financial management in providing optimal public services. However, there are various problems such as low capital expenditure allocations, dependence on the central government, insufficient regional income, and uneven economic growth, which can affect the effectiveness of regional financial performance. This study aims to analyze the effect of capital expenditure, PAD, balancing funds and economic growth on financial performance in Central Java province in 2021-2023. Data were analyzed using multiple linear regression. The results of this study indicate that capital expenditure has a positive influence and PAD has a negative influence, while balancing funds and economic growth have no influence on regional financial performance.

Keywords : Capital Expenditure; Regional Original Income; Balancing Funds; Economic Growth; Regional Financial Performance

PENDAHULUAN

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 mencapai Rp857,59 triliun, sedangkan TKD pada tahun 2023 sebesar Rp814,72 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp769,61 triliun yang artinya dari tahun ke tahun anggaran TKD terus mengalami peningkatan (djpk.kemenkeu.go.id). Namun, masih terdapat banyak pemerintah daerah yang tidak mengutamakan alokasi anggaran mereka untuk belanja modal, melainkan untuk belanja operasional. Selain, memiliki anggaran belanja

modal yang sedikit, Jawa Tengah juga termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 10,47% per Maret 2024 (jateng.bpk.go.id).

Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dinilai belum efektif. Selain itu, APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit Rp1.017.706.616.000 sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kinerja keuangan daerah (jateng.bpk.go.id).

Kinerja keuangan dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi sejauh mana aturan keuangan telah diterapkan dengan optimal dalam menjaga kualitas layanan yang diharapkan. Hasil evaluasi yang tinggi memberikan keuntungan tambahan yang berpotensi menarik minat investor untuk berinvestasi.

Armaja et al. (2015), Ardelia et al. (2022), Nurhayati (2020), Padang (2023) dan Wulandari et al. (2022) memperoleh hasil belanja modal, PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, serta pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Belanja modal adalah belanja pemerintahan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan infrastruktur tidak dapat dipercepat tanpa adanya belanja modal yang cukup, sedangkan infrastruktur merupakan faktor pendorong bagi kinerja keuangan daerah. Ketika suatu daerah mengelola keuangannya secara efektif, kinerja keuangan daerah tersebut akan mengalami peningkatan. Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan guna meningkatkan kinerja keuangan yang baik (Sindonews.com). Penelitian-penelitian mengenai kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh belanja modal membuahkan perbedaan hasil. Anggraeni (2020), Digdowiseiso et al. (2022), dan Ernawati et al. (2023) menyatakan belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif. Namun, Febrianty & Putra (2023), Padang (2023), Safitri et al. (2022) membuktikan hasil yang berlawanan, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan.

PAD juga mampu memberikan pengaruh pada kinerja keuangan daerah. PAD diperoleh dari berbagai jenis penerimaan yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah. Peningkatan PAD dalam anggaran daerah akan mengurangi permintaan akan dana transfer, sehingga mampu menaikkan kinerja keuangan daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Sari & Halmawati (2021), Digdowiseiso et al. (2022), Ardelia et al. (2022), dan Safitri et al. (2022) menyatakan PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif.

Namun, Azhar (2021), Periansya et al. (2021), dan Ernawati et al. (2023) memberikan hasil yang berlawanan, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Kinerja keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi belanja modal dan PAD, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dana perimbangan. Dana perimbangan adalah bantuan dana dari pusat guna mendukung pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerah (Padang 2023). Defisit dapat terjadi jika realisasi pengeluaran daerah melebihi pemasukan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mentransfer dana guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Namun, upaya tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan daerah, karena pemerintah daerah akan semakin bergantung pada dana transfer. Maulina et al. (2021), Padang (2023), Andjarwati et al. (2021) menyatakan dana perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah positif. Berbeda dengan Anggraeni (2020), Digdowiseiso et al. (2022), Ardelia et al. (2022), Andaresta et al. (2021) yang memberikan hasil berbeda, yaitu berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan kapasitas suatu otoritas dalam menghasilkan barang dan menyediakan layanan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Heryanti et al., 2019). Nurhayati & Hamzah (2020) dan Wulandari et al. (2022) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah positif. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Febrianty & Putra (2023), Setiani & Ismunawan (2022) yang menyatakan sebaliknya, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Penelitian terdahulu tidak melakukan penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal (otoritas yang memberi tugas) dan agen (otoritas yang menjalankan tugas) (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam pemerintahan, teori keagenan berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah. Masyarakat sebagai prinsipal memiliki wewenang untuk mengukur efektivitas kinerja keuangan daerah guna memastikan pelayanan yang optimal. Pemerintah daerah sebagai agen, yang menerima kewenangan dalam pengelolaan anggaran melalui pajak dan retribusi harus transparan mengenai kepentingan publik (Padang & Padang, 2023).

Kinerja Keuangan Daerah

Kuangan daerah meliputi seluruh tanggung jawab dan wewenang pemerintahan yang dapat diukur dalam bentuk uang. Selain itu, keuangan daerah juga meliputi berbagai aset yang bisa dimiliki daerah sesuai hak dan kewajiban (PP No. 12 Tahun 2019).

Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku dalam satu periode anggaran. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencapai visi dan misi daerah dari perspektif keuangan, yang dievaluasi melalui catatan keuangan. Mengukur kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rasio efisiensi, yaitu dengan cara membandingkannya realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah guna memfasilitasi masyarakat, tidak hanya yang dirasakan secara langsung, tetapi juga memberikan manfaat tidak secara langsung. Belanja modal yang cukup akan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga dengan adanya infrastruktur yang mendukung akan mendorong keberhasilan di berbagai sektor dan dapat meningkatkan kualitas masyarakat, serta akan mempercepat pertumbuhan kesejahteraan. Teori keagenan menyatakan bahwa ketika pemerintah daerah sebagai agen menoptimalkan belanja modal untuk penyediaan sarana dan infrastruktur, masyarakat sebagai prinsipal dapat lebih mudah menjalankan aktivitas operasional. Infrastruktur yang memadai berkontribusi pada peningkatan pelayanan umum yang pada akhirnya mencerminkan perbaikan kinerja keuangan daerah (Haque & Rohman, 2022).

Anggraeni (2020), Digdowiseiso et al. (2022), Ernawati et al. (2023), Sari & Halmawati (2021) menyimpulkan belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif. Meningkatnya alokasi pengeluaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kinerja keuangan daerah juga akan meningkat. Peningkatan pembangunan infrastruktur

dipengaruhi oleh besarnya belanja modal yang dianggarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diusulkan yaitu:

H₁: Belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Irwan Moridu (2021) memberikan pernyataan bahwa PAD adalah salah satu faktor penentu keberlanjutan pembangunan daerah dalam kebijakan desentralisasi saat ini. Jumlah dan peningkatan PAD dalam tahun anggaran membuktikan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Teori keagenan mampu menerangkan hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui PAD. Masyarakat merupakan prinsipal atau pihak yang memberikan pemasukan melalui pembayaran pungutan pajak, retribusi, pengelolaan aset terpisah, dan pendapatan sah lainnya yang berkontribusi pada kenaikan PAD. Pemerintah sebagai agen atau pengelola sumber daya memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kembali, salah satunya dengan menyediakan layanan umum yang optimal. Pemasukan dari masyarakat dan penerimaan daerah dapat menjadi penambah keuangan daerah. Hal tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi meningkat.

Putri & Amanah (2020), Fernandes & Putri (2022), Safitri et al. (2022), Digdowiseiso et al. (2022), Ardelia et al. (2022), Sari & Halmawati (2021) menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif. Artinya dengan meningkatnya PAD, kinerja keuangan daerah juga akan meningkat. Sesuai prinsip otonomi daerah yang menekankan kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diusulkan yaitu:

H₂: PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintahan nasional guna menutupi defisit anggaran, jika pengeluaran daerah melebihi pendapatan yang diperoleh, sebagai bagian dari implementasi desentralisasi, dengan tujuan menyeimbangkan anggaran pemerintah daerah dengan antar daerah. Teori keagenan menjelaskan bagaimana pemerintah pusat berperan sebagai pemberi tugas dan yang diberikan tugas yaitu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Dana transfer digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah secara efisien dan akuntabel. Melalui APBN, anggaran disalurkan guna menunjang kebutuhan daerah. Pendanaan yang diberikan oleh

pemerintah pusat berperan sebagai penghasil yang dapat memenuhi berbagai keperluan, sehingga mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.

Maulina et al. (2021) , Padang (2023), dan Andjarwati et al. (2021) menyimpulkan dana perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah positif. Dana perimbangan yang didapat dan dikelola secara optimal, akan semakin meningkatkan kinerja keuangan daerah. Berdasar pemahaman tersebut, hipotesis yang diusulkan yaitu: H₃: Dana perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah positif

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi menyajikan aktivitas keuangan yang dapat menambah pendapatan masyarakat. Perkembangan ekonomi mengungkapkan berlangsungnya pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan. Perkembangan yang baik dapat meningkatkan aktivitas investasi pada suatu daerah dan akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur daerah (Sunandar, 2023). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara perkembangan ekonomi dan stabilitas fiskal daerah dengan melihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam mengelola sumber daya ekonomi yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai prinsipal. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan daerah juga bertambah, memungkinkan peningkatan pendapatan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik atau mengurangi kemiskinan. Namun, pemerintah daerah mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, diperlukan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Wulandari et al. (2022), Nurhayati & Hamzah (2020) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah positif. Berdasar penjelasan tersebut, hipotesis yang diusulkan yaitu:

H₄: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah positif

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian

ini. Populasi penelitian yaitu pada provinsi Jawa Tengah dengan sampel 29 kabupaten dan 6 kota. Metode total sampling digunakan untuk pengambilan sampel. Data sekunder berasal dari laporan keuangan daerah, *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah jateng.bps.go.id dan *website* resmi masing-masing pemerintah daerah. Data dianalisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Variabel dependen yang dipilih yaitu kinerja keuangan daerah. Dan variabel independen yang dipilih yaitu belanja modal, PAD, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan kesuksesan pemerintahan dalam mengoperasikan tugasnya untuk mencapai target, serta tujuan pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek keuangan melalui laporan keuangan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi dapat diterapkan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rumus rasio efisiensi menurut Berizky & Kurniawan (2024) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran daerah guna mendapatkan aset dengan manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur atau peralatan, guna mendukung layanan publik (Nauw & Riharjo, 2021). Secara konseptual, ada beberapa metode untuk mendapatkan aset tetap, diantaranya dengan mendirikan sendiri, memperbarui dan membeli (Abdullah et al., 2022).

Belanja modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan Mesin + Belanja Gedung dan bangunan + Belanja Jalan, irigasi dan jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya (Nauw & Riharjo, 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pemasukan yang diperoleh dari aktivitas keuangan daerah, di mana seluruh penghasilan dianggap sebagai peningkatan nilai aset bersih dan menjadi hak daerah. Potensi ekonomi daerah yang besar dapat meningkatkan PAD, yang kemudian digunakan untuk pembangunan guna mendukung kesejahteraan dan kemajuan daerah.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah (Berwulo et al., 2017)

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah transfer keuangan yang didapat pemerintah daerah guna membiayai aktivitas pemerintahan dalam penerapan desentralisasi dan membantu daerah mengurangi kesenjangan fiskal.

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus
(Nauw & Riharjo, 2021)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan produktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil barang dan layanan serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur pencapaian pengembangan infrastruktur serta dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Perkembangan ekonomi suatu otoritas dapat diamati melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu otoritas.

Ekonomi = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2021-2023 dalam satuan rupiah
(Wahyuningsih, 2018)

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 jumlah observasi pada penelitian ini sebesar 105. Nilai *mean* kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah senilai 0,93 yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah tergolong kurang optimal atau tidak baik karena memiliki rasio di bawah angka 1 atau 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan, sementara standar layanan publik masih relatif rendah. Nilai standar deviasi kinerja keuangan daerah sebesar 0,11 yang artinya kinerja keuangan daerah memiliki tingkat variasi data yang tinggi karena melebihi nilai *mean*.

Nilai minimum kinerja keuangan daerah adalah 0,71 yang diperoleh Kabupaten Klaten tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerjanya kurang efisiensi. Nilai maksimum sebesar 1,32 yang artinya nilai rasio efisiensi tertinggi diperoleh Kabupaten Kebumen tahun 2023 sehingga dikatakan kinerja keuangan sangat baik dan efisiensi.

Uji Pemilihan Model

Pemilihan model regresi dilakukan dengan melakukan tiga jenis uji, yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier (LM). Kriteria pemilihan model pada uji chow yaitu dengan menentukan pilihan model CE dan FE. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka pilihan terbaik adalah *Fixed Effect Model*, sedangkan jika nilai probabilitas di atas 0,05 maka *Random Effect Model* adalah pilihan terbaik. Pada tabel 2 diketahui nilai probabilitas 0,0000 (<5%). Oleh karena itu, model yang terpilih adalah *Fixed Effect* (FE).

Selanjutnya uji hausman dilakukan jika FE adalah model yang terpilih pada uji chow. Jika nilai probabilitas di atas 0,05 maka pilihan terbaik adalah *Random Effect Model*, sedangkan jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka pilihan terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Pada tabel 2 diketahui nilai probabilitas 0,0035 (<5%). Dengan demikian, *Fixed Effect* (FE) adalah model yang terpilih.

Kemudian uji LM dilakukan jika pada uji chow model yang terpilih yaitu CE. Berdasar pada hasil pengujian di atas, *Fixed Effect Model* (FEM) terbukti menjadi model terpilih yang dapat diterapkan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian dalam tabel 3 memperoleh nilai VIF belanja modal sebesar 2,56, PAD sebesar 3,59, dana perimbangan sebesar 2,54, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58. Nilai VIF yang dihasilkan dari perhitungan menunjukkan bahwa semua variable memiliki nilai di bawah 10. Hasil tersebut membuktikan data lolos uji multikolinearitas. Hasil pengujian *white's test* dalam tabel 3 diketahui nilai probabilitas 0,2244, di mana di atas 0,05, menunjukkan data lolos uji heterokedastisitas. Dan hasil pengujian *wooldridge test* dalam tabel 3 memperoleh nilai probabilitas 0,1545, di mana di atas 0,05, menunjukkan data lolos uji autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian regresi linear berganda model *Fixed Effect* (FE) menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$KKD = 2,193474 + 0,091001 \text{ BM} + 0,0279148 \text{ PAD} - 0,1170937 \text{ DP} - 0,0478766 \text{ PE} + e$$

Hasil persamaan pada tabel 4 menunjukkan koefisien konstanta dengan nilai positif sebesar 2,193474, yang artinya jika belanja modal, PAD, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai 0, maka kinerja keuangan daerah bernilai

2,193474. Koefisien regresi belanja modal menunjukkan nilai positif 0,091001, maka peningkatan belanja modal 1% akan berdampak 0,091001 terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Koefisien regresi PAD menunjukkan nilai positif 0,0279148, maka peningkatan PAD 1% akan berdampak 0,0279148 terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Koefisien regresi dana perimbangan menunjukkan nilai negatif 0,1170937, maka peningkatan dana perimbangan 1% akan berdampak 0,1170937 terhadap penurunan kinerja keuangan daerah. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai negatif 0,0478766, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% akan berdampak 0,0478766 terhadap penurunan kinerja keuangan daerah.

Uji Hipotesis

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasar tabel 4, diketahui nilai signifikansi belanja modal bernilai 0,014, di mana kurang dari 0,05 dengan nilai t 2,49 yang membuktikan adanya pengaruh signifikan dengan arah positif. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan belanja modal memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif **diterima**.

Hasil penelitian sesuai dengan teori keagenan yang menekankan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai agen dalam menyediakan infrastruktur dan sarana yang mendukung kegiatan masyarakat. Dengan pengelolaan belanja modal yang optimal, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sehingga mencerminkan kinerja keuangan daerah yang lebih efektif. Hal tersebut juga dapat dilihat pada nilai maksimum belanja modal sebesar Rp 1.089.358.396.203 yang diperoleh Kota Semarang tahun 2023 dengan kinerja keuangan daerah sebesar 1% yang hampir mendekati nilai maksimum kinerja keuangan daerah yaitu 1,32%.

Anggraeni (2020), Sari & Halmawati (2021), Digdowiseiso et al. (2022), dan Ernawati et al. (2023) mendukung adanya pengaruh ke arah positif. Besarnya alokasi belanja modal oleh pemerintah berkontribusi pada pengembangan fasilitas dan potensi wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung tercapainya kinerja yang optimal.

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasar tabel 4, diketahui nilai signifikansi PAD bernilai 0,507, di mana lebih dari 0,05 dengan nilai t 0,58 yang membuktikan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan PAD memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif ditolak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan PAD suatu daerah tidak selalu berpengaruh pada perbaikan kinerja keuangan daerah tersebut. Ketergantungan pada sumber PAD yang diperoleh dari pungutan pajak dan tarif bersifat statis inilah yang membatasi potensi inovasi dalam pengelolaan pendapatan. Anggaran yang dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab tidak selalu disebabkan oleh besarnya PAD. Keberhasilan kinerja keuangan daerah tetap bergantung pada bagaimana anggaran dikelola dan dialokasikan secara optimal.

Azhar (2021) dan Periansya et al. (2021) mendukung tidak adanya pengaruh yang signifikan. Kontribusi dari pemerintah belum mampu menaikkan efektivitas dalam manajemen kinerja keuangan daerah secara optimal. PAD belum berhasil meningkatkan kinerja keuangan daerah dikarenakan tingginya angka kemiskinan pada setiap daerah mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah yang mengakibatkan PAD tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan program-program pemerintah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasar tabel 4, diketahui nilai signifikansi dana perimbangan bernilai 0,025, di mana kurang dari 0,05 dengan nilai t -2,28 yang membuktikan adanya pengaruh signifikan dengan arah negatif. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif **ditolak**.

Hasil di atas menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah dan sebaliknya. Ketergantungan yang semakin besar pada dana transfer, tidak akan mempengaruhi kenaikan kinerja keuangan daerah, tetapi justru berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai maksimum dana perimbangan sebesar Rp 2.069.759.691.037 yang diperoleh Kota Cilacap tahun 2023 dengan kinerja keuangan 1,10 dimana nilai tersebut mendekati nilai minimum kinerja keuangan daerah yang besarnya 0,71.

Prastiwi & Aji (2020) Anggraeni (2020), Andaresta et al. (2021), Ardelia et al. (2022) dan Digdowiseiso et al. (2022) mendukung adanya pengaruh signifikan dengan arah negatif. Dengan meningkatnya dana transfer akan menunjukkan rendahnya

kemampuan keuangan dan kemandirian daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana ini membatasi hak dan kewenangan daerah dalam mengelola pemasukan, yang kemudian akan mengakibatkan prinsip otonomi daerah sulit direalisasikan. Ketergantungan ini berimbas pada kemandirian yang rendah, yang pada akhirnya mencerminkan kinerja keuangan yang lemah atau tidak optimal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasar tabel 4, diketahui nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi bernilai 0,189, di mana lebih dari 0,05 dengan nilai t -1,32 yang membuktikan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif **ditolak**.

Hasil di atas membuktikan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, memanfaatkan peluang dan membatasi hambatan yang ada. Tanpa pengelolaan yang baik, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan daerah.

Febrianty & Putra (2023) dan Setiani & Ismunawan (2022) mendukung tidak adanya pengaruh yang signifikan. Kinerja keuangan daerah tidak secara langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan ekonomi di suatu otoritas tidak selalu beriringan dengan meningkatnya kinerja keuangan daerah. Meskipun peningkatan ekonomi di otoritas tersebut mengalami perubahan yang fluktuatif (naik dan turun) akibat berbagai faktor produksi, hal ini tidak secara langsung meningkatkan kinerja keuangan. Proses peningkatan kinerja keuangan membutuhkan waktu yang lama serta harus berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil uji hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara positif signifikan dan dana perimbangan mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara negatif dan signifikan, sedangkan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu nilai koefisien determinansi (R^2) pada tabel 4 sebesar 0,1303 yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan kinerja keuangan daerah sebesar 13%, sedangkan 87% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat mengganti variabel yang tidak berpengaruh menjadi berpengaruh pada kinerja keuangan daerah juga dapat menambahkan variabel baru, serta mengganti objek penelitian dan menambah sampel penelitian supaya memperoleh hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Sari, I. M., & N., Y. A. (2022). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 80–92. <https://doi.org/10.33772/jak-uh.v7i1.24546>
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227/882>
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Anggraeni, D. R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Azhar, I. (2021). The Effect of Regional Local Revenue on Financial Performance of The Langsa City Goverment. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164–174.
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33.
- Digdownseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

- Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Ernawati, Dirgantari, N., Pramono, H., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021. *Jurnal EK&BI*, 6(2), 245–256. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i2.1178>
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *JKA : Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 31–46.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Haque, K. S., & Rohman, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x69pkFAAAAJ&cstart=600&pagesize=100&citation_for_view=x69pkFAAAAJ:z62hWG5Wpo0C
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Irwan Moridu. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanj Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Periansya, Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of The Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>

- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemeritah, dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 401–409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Setiani, I., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 261–276.
- Sunandar, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Pendidikan Kepada Daerah, Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). In *Universitas Islam Indonesia*.
- Wahyuningsih, S. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2012-2016. *Digital Repository Universitas Jember*, September 2019, 1–99. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/96045/SRIWAHYUNINGSIH-140810101144.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Wulandari, S. O., Thoyib, M., & Mubarak, M. H. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1134–1143. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.593>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
BM	105	305.833.589.783	164.830.002.115	75.192.210.131	1.089.358.396.203
PAD	105	486.930.548.690	384.919.967.381	240.959.878.632	2.835.150.144.867
DP	105	1.345.191.849.088	359.983.143.053	525.532.389.944	2.069.759.691.037
PE	105	30.071.167.524	27.272.226.882	6.513.890.000	161.849.110.000
KKD	105	0.93	0.11	0.71	1.32

(Sumber: LKPD yang diolah pada tahun 2025)

Tabel 2. Uji Pemilihan Model

Jenis Uji	Statistik Uji (prob)	Model yang Dipilih
Uji Chow (OLS vs FE)	0.0000	<i>Fixed EffectModel</i>
Uji Hausman (FE vs RE)	0.0035	<i>Fixed EffectModel</i>

(Sumber: LKPD yang diolah pada tahun 2025)

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Metode Uji	Hasil	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	BM = 2.56	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
		PAD = 3.59	
		DP = 2.54	
		PE = 4.58	
Uji Heteroskedastisitas	<i>White's Test</i>	0.2244	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi	<i>Wooldridge Test</i>	0.1545	Tidak terjadi gejala autokorelasi

(Sumber: LKPD yang diolah pada tahun 2025)

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda

Kinerja Keuangan Daerah	Coefficient	t	p > t
BM	0.091001	2.49	0.014
PAD	0.0279148	0.58	0.564
DP	-0.1170937	-2.28	0.025
PE	-0.0478766	-1.32	0.189
Constant	2.193.474	1.74	0.085
R ²	0.1303		

(Sumber: LKPD yang diolah pada tahun 2025)